GALANGGANG SEJARAH
http://ejournal.pamaaksara.org/index.php/gs

Vol. 1 No. 3 (Juli 2019)
Page: 375-393
DOI: 10.5281/zenodo.3514443

ISSN (Online): 2684-8767

MELIHAT PENYIMPANGAN POLITIK MASA ORDE BARU DARI KACA MATA KARYA SASTRA (SEBUAH STUDI HISTORIGRAFI)

Sonia Nofti Hanugrah[1,(*)], Etmi Hardi[1]
[1]Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
[(*)]sonianofti4486@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang penyimpangan politik masa Orde Baru dari perspektif karya sastra mengenai masa itu. Karya yang diteliti adalah novel Ahmad Tohari yang berjudul "Orang-orang Proyek" dan novel karya Kuntowijoyo yang berjudul "Wasripin dan Satinah". Sebagai salah satu dari sumber sejarah, kedua novel ini mampu memberikan gambaran tentang penyimpangan politik yang terjadi masa Orde Baru. Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana sebenarnya penyimpangan politik yang disorot melalui karya sastra kedua penulis yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, di mana penelitian ini hanya membataskan diri pada bahan-bahan yang koleksi perpustakaan saja, tanpa melakukan riset ke lapangan atau wawancara. Metode yang digunakan adalah metode analisis isi. Temuan dalam penelitian ini adalah adanya kesamaan antara penyimpangan politik masa Orde Baru yang digambarkan oleh kedua karya novel ini. Tidak tertadapat perbedaan antara kedua karya novel dengan pemaparan yang terdapat dalam buku teks sejarah yang telah dibaca. Walaupun begitu, terdapat perbedaan penggambaran tentang penyimpangan politik oleh kedua karya novel ini. Karya Ahmad Tohari lebih menggambarkan penyimpangan politik yang dilakukan adalah elit politik yang berkuasa dengan memanfaatkan dan menguras dana proyek, tanpa memikirkan dampak negatif yang dialami. Kuntowijoyo lebih menggambarkan penyimpangan politik, yaitu berbagai cara yang dilakukan oleh partai politik untuk mendapatkan kekuasaan, termasuk mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Selain itu, juga terdapat persamaan antar kedua karya novel ini, yaitu korban yang dilakukan pihak yang berkuasa adalah rakyat kecil.

Kata Kunci: *Historiografi, Karya Sastra, Orde Baru, Penyimpangan Politik*

PENDAHULUAN

Sejarah berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Begitupun dengan ilmu sastra. Pemakaian realita masa lampau atau sejarah dalam sastra dapat melahirkan karya sastra sejarah. Tempat kejadian, tokoh, peristiwa dalam sejarah dipakai sastrawan menulis karyanya. Sastra menggunakan sejarah sebagai bahan baku dalam pembuatan karya sastranya. Sastra bebas dalam memasukkan imajinasinya, bebeda dengan sejarah, sejarah lebih terikat pada fakta-fakta. Jika sastra ditelaah melalui historiografis, fungsinya lebih merupakan ilustrasi, simbol, retorika, yang isinya dikonfirmasi melalui sumber-sumber sejarah, seperti arsip, dokumen, dan surat kabar.

Karya sastra merupakan media yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan pengalamannya. Selain itu, karya sastra juga dapat merefleksikan pandangan pengarang terhadap berbagai masalah yang diamati di lingkungannya. Realitas sosial yang dihadirkan melalui teks kepada pembaca merupakan gambaran tentang berbagai fenomena sosial yang pernah terjadi di masyarakat dan dihadirkan kembali oleh pengarang dalam bentuk dan cara yang berbeda (Sugihastuti, 2002).

Karya sastra merupakan hasil karya manusia dengan mendayungkan imajinasi yang terdapat dalam diri pengarangnya. Keberadaan karya sastra dalam kehidupan manusia dapat mengisi "kedahagaan jiwa" karena membaca karya sastra bukan saja memberikan hiburan, tetapi dapat memberikan pencerahan jiwa. Dengan kata lain, karya sastra dapat memberikan hiburan dan manfaat (Yanti, 2015). Karya sastra merupakan fenomena sosial budaya yang melibatkan kreativitas manusia. Karya sastra lahir dari pengekspresian endapan pengalaman yang telah ada dalam jiwa pengarang secara mendalam melalui proses imajinasi (Aminudin, 1990). Karya sastra sebagai refleksi realitas, tidak sekadar melaporkan realitas itu sendiri, namun melaporkan realitas yang telah menjadi pemikiran pengarangnya. Dengan demikian, realitas hadir untuk kepentingan pemikiran itu sendiri (Junus, 1981).

Dalam penulisan karya sastra tersebut, sejarah bersifat struktural, artinya sejarah bukan saja hadir sebagai penghias supaya cerita menarik, tetapi ikut beroperasi secara a priori (utama) dalam seluruh pekerjaan merekonstruksi sejarah. Novel merupakan salah satu bentuk dari karya sastra yang berkaitan erat dengan sejarah. Novel sejarah lahir sebagai jawaban intelektual dan literer terhadap problematik suatu zaman dengan menggunakan masa lampau sebagai refleksi. Novel sejarah tidak perlu menjadikan tokoh sejarah tokoh utamanya atau tokoh-tokoh sejarah sebagai tokoh-tokohnya (Megawati, 2009).

Novel berbicara banyak hal, salah satunya berbicara mengenai penyimpangan politik. Tidak sedikit fakta-fakta yang menjelaskan betapa banyaknya penyimpangan politik yang terjadi pada masa Orde Baru. Penyimpangan tersebut seakan-akan muncul diberbagai aspek. Seperti, tindakan korupsi yang merajalela oleh para petinggi negara. Pada masa Orde Baru pemilu hanya dijadikan sarana dalam mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden terus menerus dipilih dan menjadi presiden kembali. Istilah demokrasi yang digunakan pada Orde baru ini hanyalah sebuah penipuan. Seperangkat lembaga otoriter yang disusun guna mengekang partisipasi politik dan memungkinkan para penguasa pada rezim ini untuk menguasai rakyat (Emmerson, 2001). Selain itu kebebasan untuk mengemukakan pendapat seakan dipenjarakan. Dengan berbagai peyimpangan politik yang dilakukan oleh pemerintahan masa Orde baru, mengakibatkan kekecewaan rakyat dan tidak mempercayai pemerintahan Orde Baru. Kebijakan pemimpin negara dalam memecahkan berbagai kemelut di dalam negeri dipandang oleh rakyat sebagai suatu kebijakan yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Ketidakpuasan masyarakat yang menumpuk itu akhirnya meledak dalam bentuk demonstrasi (Poesponegoro & Notosusanto, 2008). Salah satu yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Orde Baru KKN semakin merajalela, sedangkan kemiskinan rakyat terus meningkat (Sudirman, 2014).

Dalam melihat penyimpangan politik yang terjadi pada masa Orde Baru melalui karya novel, penulis mengambil dua novel yang menjelaskan permasalahan yang terjadi pada masa Orde Baru. Penulis sengaja mengambil penelitian pada masa Orde Baru ini, karena banyak muncul fakta baru mengenai Orde Baru pada karya sastra tersebut, selain itu terdapat juga karya sastra yang membahas Orde Baru. Penulis sengaja mengambil kaya dari Tohari (2015), karena novel tersebut mengangkat idealisme dan kejujuran yang harus ditegakkan dalam situasi dan kondisi apapun. Novel ini mengkritisi zaman pemerintahan Orde Baru 1980-1990.

Selain Ahmad Tohari, Kuntowijoyo juga terkenal dengan berbagai karyanya, Kuntowijoyo dalam karya-karyanya selalu tampil sebagai pemikir, budayawan, dan sastrawan dari pada aktivis. Kritiknya sangat tajam, empiris tetapi jujur. Hal yang menarik dari novel "*Wasripin dan Satinah*" yaitu penceritaan yang ditampilkan dalam novel tersebut tidak secara langsung menunjukkan penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Dua novel tersebut hendak dijadikan sebagai sumber bahan utama untuk penelitian, Novel-novel tersebut adalah novel "*Orang-orang Proyek*" karya Tohari (2015), dan novel "*Wasripin dan Satinah*" karya Kuntowijoyo (2003).

Kedua novel di atas merupakan novel yang menggambarkan penyimpangan politik yang terjadi pada masa Orde Baru. Dalam fokus penelitian ini adalah politik yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kedekatan pengarang dengan sumber di lapangan maupun dokumen tertulis menjadikan karya novel tersebut representatif terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Masing-masing pengarang menulis dari data menjadi sebuah cerita yang mampu menggambarkan suasana zaman melalui karya sastra novel (Kuntowijoyo, 2003; Tohari, 2015).

Ide penelitian ini muncul saat penulis membaca kedua novel tersebut. Kedua novel tersebut menggambarkan penyimpangan yang terjadi pada Orde Baru sangatlah dengan telaten. Penguasaan materi yang baik dari kedua penulis dan juga urgensi dari permasalahannya, membuat kedua novel ini penting untuk di teliti.

Kedua novel di atas menarik untuk dijadikan objek penelitian karena banyaknya menyoroti kehidupan pada masa Orde Baru. Selain itu alasan pemilihan objek penelitian adalah di dalam kedua novel ini dari banyaknya novel yang pro dan kontra pada masa Orde Baru, peneliti lebih tertarik kepada kedua novel ini, karena pembahasan yang sangat mengkritisi dan terang-terangan kontra terhadap rezim tersebut. Selain itu, cerita digambarkan dengan penokohannya yang jelas. Sehingga pembaca akan lebih mudah memahami dan dapat menghadirkan kembali peristiwa yang terjadi pada masa lampau ke dalam diri mereka. Untuk melihat lebih jauh hasi karya diatas, penulis mengangkatkan tema tentang kehidupan pada masa Orde Baru ke dalam bentuk penelitian secara ilmiah yang berjudul "Melihat Penyimpangan Politik Masa Orde Baru dari Kaca Mata Karya Sastra (Sebuah Studi Historigrafi)".

METODE

Penelitian ini merupakan studi historiografi yang menekankan pada pendekatan kepustakaan. Analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa (Bungin, 2006). Metode ini digunakan mempelajari serta mengungkapkan arti yang lebih dalam sebuah isi komponen suatu karya. Isi dari metode ini terdapat dua macam, pertama isi laten, merupakan isi yang terkandung didalam dokumen tersebut, yang kedua isi komunikasi merupakan pesan yang terkandung akibat dari komunikasi yang terjadi (Hudaya, Zed, & Hardi, 2019).

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis adalah pendekatan kepustakaan merupakan penulisan sejarah berdasarkan sumber sejarah dibatasi hanya dari perpustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada kegiatan bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa melakukan riset lapangan. Penelitian tersebut hanya bisa dijawab dengan penelitian pustaka dan sebaliknya tidak bisa mengaharapkan adanya data dari riset lapangan (Zed, 2008). Untuk langkah pertama mengumpulkan karya-karya mengenai Orde Baru, lalu mengelompokkan karya-karya tersebut dalam struktur tersendiri, menyiapkan bibliografi kerja, membaca dan mencatat bahan penelitian.

Analisis isi dilakukan dengan memilih kalimat yang dapat dianalisis, untuk menemukan fakta sejarah. Lalu membandingkan dengan buku-buku teks sejarah terkait. Maksud dari kalimat-kalimat yang dapat dianalisis adalah kalimat yang terdapat penceritaan pengarang dalam karya novelnya dan memiliki hubungan dengan penyimpangan politik masa Orde Baru. Terakhir adalah menyajikan data tersebut dalam karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Orde Baru dalam Beberapa Karya Sejarah

Pertama, buku "*Sejarah Resmi Indonesia Modern: Versi Orde Baru dan Para Penentangnya*". Sikap yang terdapat pada Orde Baru terhadap revolusi sangatlah berkaitan dengan peristiwa 30 September 1965 dan akibatnya. Pembunuhan tujuh petinggi militer Indonesia menandai awal dari akhir cengkrama Sukarno dan awal kebangkitan Orde Baru. Untuk mengembalikan kestabilan dari politik dan ekonomi, pada rezim yang dipimpin oleh Soeharto ini mengambil sikap yang berbeda dari yang sebelumnya. Dalam hal ini, militer sangatlah diberikan peranan penting dan menonjol. Politik diatur dengan hati-hati untuk mencegah disharmoni sosial, pegawai negri, petani dan militer dikendalikan melalui dibentuknya partai pemerintah dan pemilu yang diatur (Wood, 2013).

Pembunuhan yang sebenarnya dalam versi Orde Baru ini dilakukan di perumahan urban elit, penculikan dan kekerasan juga terjadi. Selain itu adanya percobaan kudeta terhadap polisi. Namun pembunuhan ini tidak diperjelas karena menjadi penindasan yang kejam oleh warga dan militer (Wood, 2013).

Kedua, Orde Baru dalam buku "*Indonesia Beyond Soeharto*". Sistem politik otoriter yang dibangun dan dipimpin Soeharto telah berlangsung lebih dari tiga puluh tahun lamanya. Pada rezim ini, Soeharto menjadika pancasila

sebagai azas tunggal yang harus dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Namun praktis orang Indonesia yang aktif berpolitik mendukung azas tersebut, baik pendukung ataupun penolak Orde Baru menafsirkan secara berbeda sila-sila yang berkonotasi banyak tersebut (Emmerson, 2001).

Dilihat secara teknis, prosedur pemilu, seperti perhitungan suara, pada umumnya dijalankan dengan jujur. Namun secara substantif, pemerintah di untungkan, karena kurang dari sebulan diizinkan untuk kampanye, kemampuan peraturan yang membatasi kegiatan kampanye digunakan untuk menghambat parta non pemerintah. Dalam hal ini, hanya tiga golongan partai diizinkan untuk ikut serta dalam pemilu: partai negara yang disebut Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) (Emmerson, 2001).

Pada pemilu 1971, Pemerintah mempersiapkan diri menghadapi pemilu dengan keterampilan organisator yang menyolok. Berdasarkan taksiran kekuatan setempat Golkar dan pesaingnya, setiap provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, maupun dukuh diberi jatah suara yang targetkan akan masuk Golkar. Jatah itupun cenderung rendah di daerah Muslim yang dikira lebih kuat imannya, dimana partai Islam dianggap lebih berakar, dan lebih tinggi yang dulu menjadi benteng nasionalis atau komunis (Emmerson, 2001).

Baik partai PDI maupun PPP tidaklah diberi izin untuk mempunyai cabang dibawah tingkat Kabupaten, sedangkan Partai Golkar dibiarkan hadir dimana saja, kantor pemerintah yang dimiliki oleh Golkar berada dimanapun. Setiap orang yang akan dicalonkan partai lewat pemilu lima tahunan untuk mengisi kedudukan dikursi legislatif tersebut haruslah diperiksa terlebih dahulu oleh para peguasa.

Banyak berbagai kelompok sosial keanggotaannya yang hadir untuk melawan pemeritah dengan cara mengharuskan masuk kepada organisasi yang bermonopoli, seperti usaha komunis atau fasis. Sasaran utama kekerasan yang terjadi pada Orde Baru adalah paham komunis. Banyaknya pembunuhan yang dilakukan dari orang sipil, khususnya orang yang taat beragama dan takut kepada komunis yang atheis (Emmerson, 2001).

Dengan banyaknya kemelut yang terjadi di rezim ini, seperti peristiwa tri sakti, yang banyak membuat kerusakan dan kerusuhan yang sangat hebat disepanjang rezim Orde Baru, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya untuk menghindari pertumpahan darah yang terjadi.

Ketiga, Orde Baru dalam buku "*Kamus Kejahatan ORBA*". Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadi perbincangan di berbagai kalangan pada masa Orde Baru ini. Korupsi menjadi maksiat yang sangat jahat, bahkan

lebih jahat dari pedagang narkoba. Kaum koruptor sedang melakukan pengurasan harta kekayaan negeri terus menerus. Perselingkuhan yang dilakukan penguasa dengan pengusaha untuk membagi keuntungan yang mengakibatkan kebangkrutan negara dan kehidupan yang sulit bagi rakyat kala itu (Harsutejo, 2010).

Korupsi tidah hanya penyalahgunaan jabatan yang mereka miliki, namun melawan hukum kerugian negara, korupsi yang dilakukan bisa dilihat seperti suap, perbuatan curang, pemerasan, penggelapan dalam jabatan. Bahkan politik uang dijadikan untuk memperlancar jabatan politik sekaligus program politik yang akan dijalaninya untuk menguntungkan diri dan gengnya tersebut (Harsutejo, 2010). Kerugian tersebut tidak hanya merugikan negara, tentunya kerugian untuk rakyat.

Seluruh sejarah Orde Baru merupakan sejarah korupsi, rezim ini dibangun dengan fitnah dan kebohongan. Berbagai rekayasa fitnah mnejurus pada seluruh sejarah rezim ini sampai kejatuhan Soeharto. Hanya saja sejumlah warisan dasar dari rezim Orde Baru masih tetap dipelihara oleh pemerintah kemudiannya. Semua dongeng tentang Orde Baru bahkan dibakukan dalam kurikulum yang disusun para Pusat Sejarah ABRI. Rezim militer masa Orde Baru ini memiliki waktu yang cuku untuk kesempatan dan keleluasaan untuk melakukan segala rekayasa termasuk pada sejarah negeri ini. Korupsi sejarah yang dilakukan pada Orde Baru telah meracuni pikran dan hati nurani jutaan kaum muda dan rakyat Indonesia itu sendiri sampai jangka panjang dan menyembunyikan kebenaran dan menyebar luaskan cerita yang menyeramkan dengan dinamai mereka dengan kata sejarah (Harsutejo, 2010).

Rezim Orde Baru ini dibangun di atas berbagai kebohongan dan fitnah, berbagai kudeta militer, pelanggaran hak asasi manusia, dibangun diatas lumuran darah berjuta rakya Indonesia. Pemilu pertama yang dilakukan pada rezim ini, menunjukkan segala hal dilakukan untuk mendapatkan kedudukan dan hak suara, kecanggihan yang dianut pada Demokrasi Pancasila tersebut mengalahkan berbagai alat modern dari manapun.

Potret Penyimpangan-penyimpangan Politik Orde Baru dalam Dua Karya Sastra

Keserakahan Elit Politik

Berbicara tentang keserakahan elit politik, memang tidak dapat lagi kita pungkiri pada masa Orde Baru tersebut. Demi untuk mendapatkan keuntungan, bahkan merugikan rakyat kecil sekalipun, seperti halnya dalam

pembangunan jembatan, para elit berkuasa bahkan menggerogoti proyek yang berjalan tersebut. Bahkan para pemimpin hanya memikirkan keselesaian pada jembatan yang sedang berjalan itu untuk pemanfaatan ajang pemilu, tanpa memikirkan kerugian yang akan dialami orang banyak. Seperti kutipan yang dinyatakan oleh Kabul dann Pak Tarya berikut ini:

> "Dan kerusakan itu membuat kerugian yang cukup besar. Serta memberi beban bathin karena hasil kerja beberapa hari dengan biaya jutaan lenyap seketika."
>
> "Tapi, Mas Kabul, banjir adalah urusan alam. Jadi, buat apa disesali dan dibuat sedih?"
>
> "Karena kerugian itu sesungguhnya bisa dihindarkan bila awal pelaksanaan pembangunan jembatan itu ditunda sampai musim kemarau tiba beberapa bulan lagi. Itulah rekomendassi dari para perancang. Namun rekomendasi itu diabaikan, konon demi mengejar waktu."
>
> "Maksudnya?"
>
> "Penguasa yang punya proyek dan para pemimpin politik lokal menghendaki jembatan itu selesai sebelum pemilu 1992. Karena, saya kira, peresmiannya akan dimanfaatkan sebagai ajang kampanye partai golongan penguasa. Menyebalkan. Dan inilah akibatnya bila perhitungan teknis-ilmiah dikalahkan oleh perhitungan politik." (Tohari, 2015)

Kemunculan birokrasi pemerintah beserta jajarannya yang bekerja tidak sesuai dengan perbuatan yang mencerminkan sebagai wakil rakyat. Para birokrat justru menipu hukum dan kebijakan yang berlaku. Dalam proyek yang dijalani Kabul, kegiatan korupsi bukanlah hal yang baru lagi. Seperti yang disebutkan dalam kutipan berikut:

> "Kan zaman sudah edan, Mas. Pilihan kita hanya dua. Ikut edan atau jadi korban keedanan."
>
> "Memang sih, Pak, sekarang ini di mana tidak ada orang edan? Jajaran birokrasi pemerintah, gudangnya. Jajaran penegak hukum, tentara, Depdikbud, Depag, sama saja. Pengusaha, kontraktor, bankir, tak ada beda." (Tohari, 2015)

Pembangunan yang tidak dipikirkan lagi kualitasnya, karena dana yang telah digerogoti oleh orang-orang yang serakah, yang tidak memikirkan orang lain. Meski terkadang merekapun mengetahui dampaknya nanti. Seperti dalam kutipan berikut:

> "Aduh, Dik Kabul ini bagaimana? Sudahlah, ikuti saja perintahku. Gunakan besi itu. Toh itu hanya untuk menutupi kekurangan. Aku tahu penggunaan besi bekas memang tidak baik. Tapi bagaimana agi, dana sudah habis. Makanya, kita pun tak mampu membeli pasir giling. Dana benar-benar sudah habis. (Tohari, 2015)

Pemanfaatan Fasilitas Proyek

Sikap yang dimiliki oleh oknum pemerintahan atau orang yang memegang kekuasaan dalam memanfaatkan fasilitas proyek, bahkan mereka sering meminta uang kepada bendahara proyek untuk kepentingan pribadi mereka tanpa memikirkan orang lain atau kerugian yang dialami dalam proyek tersebut, ulah dari diri mereka hanya mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Seperti kutipan dalam novel berikut:

> Dan campur tangan itu ternyata tidak terbatas pada penentuan awal pekerjaan yang menyalahi rekomendasi para perancang, tapi masuk juga ke hal lain. Proyek ini, yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negri dan akan menjadi beban masyarakat, mereka anggap sebagai milik pribadi. Kabul tahu bagaimana bendahara proyek wajib mengeluarkan dana untuk kegiatan partai golongan penguasa. Kendaraan-kendaraan proyek wajib ikut meramaikan perayaan HUT golongan itu. Malah pernah tejadi pelaksana proyek diminta untuk mengeraskan jalan yang menuju rumah ketua partai golongan karena tokoh itu akan punya hajat. Bukan hanya mengeraskan jalan, melainkan juga memasang tarub. Belum lagi dengan oknum sipil maupun militer, juga oknum-oknum DPRD juga suka minta uang saku kepada bendahara proyek kalau mereka mau pelisir ke luar daerah. (Tohari, 2015)

Perbuatan yang mencerminkan tidak baik dilakukan oleh para pemerintah dan politikus yaang berwenang terhadap pelaksanaan proyek jembatan, perbuatan yang dilakukan itu hanya untuk keuntungan dirinya saj, namun tidak memikirkan kerugian yang dialami orang lain, karena menghambat jalannya proyek, mutu jembatan yang berkurang dan anggaran proyek yang berkurang karena kelakuan dari para oknum-oknum yang berkuasa itu. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan yang ada.

Di dalam novel "*Orang-orang Proyek*", seperti yang ditunjukkan pada sikap Kabul, meski ia mempunyai kedudukan dalam proyek pembangunan jembatan tidak lantas membuat Kabul mengambil keuntungan dari dana proyek. Walaupun sering ditertawakan Dalkijo selaku atasannya, Kabul

tetap mempertahankan idealismenya demi kelancaran proyek, seperti pada kutipan berikut ini:

> "Namun tidak seperti Dalkijo yang mendendam kemelaratan masa muda dengan memblas hidupnya yang sangat pragmatis dan kemaruk, Kabul tetap mempunyai idealisme dan sangat hemat. Proyek itu pun menurut kabul harus dilihat dari pesrpektif idealismenya, maka harus dibangun demi sebsar-besarnya kemaslahatan umum. Artinya, kualitas harus sempurna dengan memanfaatkan setiap sen anggaran sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Memang, Kabul sering ditertawakan Dalkijo."
>
> "Apa dengan mempertahankan idealismemu, orang-orang miskin disekeliling kita menjadi baik?" seloroh Dalkijo suatu saat. "Apa kejujuranmu cukup berarti untuk mengurangi korupsidi negri ini?" (Tohari, 2015)

Idealisme dan Kejujuran yang Harus Ditegakkan

Di dalam novel ini menjelaskan bahwa didalam keadaan apapun, idealisme dan kejujuran harus ditegakkan. Sebagaimana yang diceritakan pada sebuah tokoh yang bernama Kabul, ia memegang erat prinsip kejujuran dan profesionalismenya dalam bekerja, hingga memilih untuk mundur dari pekerjaan yang di dalamnya penuh dengan praktek korupsi dalam melakukan pembangunan jembatan. Sesuai percakapan didalam novel antara Pak Dalkijo selaku atasan Kabul, yang berbicara dengan Kabul:

> "Ya keputusan itu kuambil tadi malam setelah aku berbicara dengan pihak pemilik proyek, tokoh-tokoh partai dan khususnya jajaran GLM. Mereka telah setuju kebijakan yang kuambil. Dan itu pula keputusan yang kubawa saat ini"
>
> "Artinya, besi bekas, pasir yang kurang bermutu, tetap akan dipakai?"
>
> "Ya. Dan peresmian jembatan ini tetap akan dilaksanakan tepat pada HUT GLM. Itulah keputusan yang ada dan Dik Kabul kuminta bisa menerimanya"
>
> "Maaf, saya pun tetap berada pada keputusan saya. Saya tak bisa…."
>
> "Tunggu, Dik Kabul. Aku tidak akan lupa Dik Kabul dan aku sama-sama insinyur, lulus dari perguruan tinggi yang sama, hanya beda angkatan. Kita sudah sekian lama berkeja sama. Dan terus

> terang, aku sudah menganggap Dik Kabul adik kandungku. Maka laksanakanlah keputusan itu."
>
> "Maaf, Pak Dalkijo. Kalau keputusan anda sudah final, saya pun tak mungkin berubah. Saya tetap mengundurkan diri." (Tohari, 2015)

Selain memiliki idealisme dan pendirian yang kuat, Kabul memegang teguh prinsipnya tanpa dapat digoyahkan oleh apapun. Seperti percakapan yang terjadi antara Kabul dan Wati.

> "Maaf, Wat, aku memutuskan berhenti karena prinsip yang harus kubela. Aku harus pergi, namun aku minta kamu tetp bekerja sampai proyek ini selesai. Atau dianggap selesai menjelang pada HUT GLM, kira-kira sebulan lagi."
>
> "Mas mau kemana?"
>
> "Istirahat barang sebentar, mungkin dirumah Biyung. Aku janji akan tetap menghubugi lewat telepon". (Tohari, 2015)

Di dalam novel telah dijelaskan bahwa sebaik-baiknya pekerjaan, janganlah menyalah gunakan jabatan yang telah ada. Sebagaimana kutipan perkataan Kabul didalam novel:

> "Tapi saya akan tetap bekerja sebaik-baiknya sejauh yang bisa saya lakukan. Namun kalau keadaan dunia perproyekan masih seperti ini, rasa-rasanya inilah proyek saya yang terakhir." (Tohari, 2015)

Profesi yang dimiliki tokoh kabul dalam novel, mengantarkan pembangunan jembatan yang mengantarkan pada pergolakan bathin dalam diri Kabul. Permainan tersebut akan mengkhianati derajat keinsinyurannya. Seperti dalam kutipan berikut:

> "Permainan pada soal termin adalah tawar menawar tentang berapa persen bagian pejabat yang terkait agar dia bisa memberikan dana anggaran proyek untuk termin bersangkutan. Dan karena biaya proyek terkikis demikian banyak, permainan pun harus terjadi lagi dalam pengadaan barang. Pada tingkat ini, permainan berarti untuk keperluan proyek."
>
> "Sebagai insinyur, Kabul tahu betul dampak semua permainan ini. Mutu bangunan menjadi taruhan. Padahal bila mutu bangunan dipermainkan, masyarakatlah yang pasti menanggung akibat buruknya. Dan bagi Kabul hal ini adalah pengkhianatan terhadap derajat keinsinyurannya." (Tohari, 2015)

Selain itu, Kabul menyesalkan kenyataan betapa banyaknya insinyur yang kehilangan profesionalnya sebagai seorang insinyur, karena terjerumus kedalam godaan politik yang hanya mengalami kerusakan. Sementara disisi lain, para pemegang saham duduk santai dengan menikmati hasil tipuannya. Para pejabat, pemegang pusat kekuasaan, dan orang-orang dalam sederet golongannya menjadi kelaparan dengan menumbalkan rakyat kecil untuk memenuhi rasa kenyangnya. Seperti didalam kutipan berikut:

> "Seperti pernah sampeyan katakan, karena banyaknya penyimpangan dan penyelewengan?"
>
> "Ya"
>
> "Ah, Mas Kabul. Mengapa sampeyan harus gelisah? Bukankan seharusnya sampeyan bangga sebab dipercaya menangani proyek sebesar ini? Soal penyelewengan, dimana sih hal itu terjadi?"
>
> "Begini. Semua insinyur sipil, tak terkecuali saya, tahu bagaimana jembatan,yang benar-benar jembatan, harus dibangun. Nah, ke-cablaka-an saya menuntut saya agar saya tidak mengkhianati pengetahuan itu, pengetahuan teknik sipil. Tapi, dari pengalaman melaksanakan pembangunan ketiga proyek itu saya mengalami sendiri bahwa ilmu teknik sipil banyak dikebiri." (Tohari, 2015)

Berlain halnya dengan Dalkijo, yang menerima kebobolan pemerintahan, penerimaan tersebut terindekasi terhadap kesetujuannya terhadap kondisi korupsi yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ia menjadikan kemiskinan dalam dirinya sebagai hal yag pantas untuk korupsi, tanpa harus melihat pada sekelilingnya. Seperti dalam kutipan berikut ini:

> "Dik Kabul," sambung Dalkijo. "Saya tahu Dik Kabul mantan aktivis. Biasakan, aktivis mempunyai idealisme yang kolot. Tapi setelah bekerja seperti ini Dik Kabul harus tunduk pada kenyatan. Sedikit pragmatislah agar tidak konyol seperti Don Kisot."

Pertikaian Antar Partai

Di dalam novel "*Wasripin dan Satinah*" dijelaskan mengenai sebuah Partai Randu, Partai Kuda, dan Partai Langit. Ketiga partai tersebut saling berebut pendukung dari masyarakat. Dalam mencari pendukung tersebut, masing-masingnya menggunakan cara sendiri. Namun di dalam novel Partai Kuda jarang muncul. Karena Partai Kuda tidak pernah turut untuk melakukan pertikaian dalam mendapatkan hak suara.

Partai Randu memiliki kekuasaan paling tinggi dari partai lainnya. Anggota-anggota yang dimilikinya pun pernah dalam kursi pemerintahan.

Semua orang bahkan TNI tunduk pada perintah dari pimpinan Partai Randu tersebut. Seperti dalam kutipan berikut:

> "Untuk keperluan partai di alun-alun kota didirikanlah sebuah panggung pertunjukan yang akan diisi rombongan artis-artis keliling dan ibu kota. Dalam rencana Bupati, Keoala Daerah, Komandan Tentara, dan Kepala Polisi akan minta menyumbangkan suara. Soal perizinan, Partai Randu tinggal menelpon Kepala Polisi. Pengamanan polisi ekstra kuat diperlukan larna Partai Randu memperkirakan yang menonton pasti banyak ekstrem kanan dan Golputnya." (Kuntowijoyo, 2003)

Kekuasaan Partai Randu tersebut sangatlah besar, mendapatkan sebuah perizinan sangatlah mudah dilakukan oleh Partai Randu ini. Selain itu untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang akan membantunya untuk mencapai tujuan tersebut sangat mudah.

Beda halnya dengan masyarakat di Kampung Nelayan, Partai Randu ini tidak mendapatkan suara karena menurut mereka pimpinan dan anggota partai Randu ini terlalu sering melakukan penyimpangan ataupun penyelewengan. Masyarakat tersebut lebih memilih pemimpin yang merupakan penduduknya yang dikenal jujur dan memiliki kesaktian seperti Wasripin. Wasripin yang diakui sebagai pemimpin yang dapat mereka percayai. Partai Randu dan Partai Langit saling bertikai untuk menarik pimpinan masyarakat ini untuk menjadi anggotanya. Seperti kutipan berikut ini:

> "Kabar bahwa Wasripin telah kedatangan Nabi Hidhir itu menular kesemua orang. Begitu cepat, sehingga bukan nelayan saja tapi juga aparat dan partai-partai. Partai Randu dengar, Partai Langit dengar. Mereka masing-masing mengadakan rapat kilat. Wasripin akan sangat menguntungkan bagi kemenangan Partai mereka di Perkampungan Nelayan itu dalam pemilu yang sudah diambang pintu. Dan mereka tidak mau kehilangan momentum, mumpung masih hangat beritanya. Partai Randu memutuskan memberi jabatan koordinator pemenangan pemilu bagi Wasripin. Partai Langit memutuskan untuk mengangkatnya menjadi salah satu ketua." (Kuntowijoyo, 2003)

Pimpinan Partai Randu yang bersahabat dengan pemerintah, melakukan berbagai cara agar Wasripin karena ia dapat menjadi pusat kegagalan partai pimpinannya tersebut untuk menang. Dengan melihat

kesalahan yang ada pada Wasripin tersebut, karena Wasripin tidak memiliki identitas apapun.

Di dalam pertikaian yang terjadi, seperti Partai Randu dan Partai Langit, mereka saling menjatuhkan, bahkan saling tuduh menuduh untuk mendapatkan tujuan mereka tersebut. Seperti dalam kutipan berikut:

> "Pemogokan itu benar-benar terjadi waktu ada tawur antar pendukung Partai Randu dan Partai Langit. Partai Langit munuduh Partai Randu mencuri start, kampanye sebelum waktunya. Partai Randu membantah, itu hanya pertemuan biasa untuk konsolidasi. Partai Langit mengatakan pertemuan biasa itu seharusnya tanpa pidato-pidato di alun-alun kota."
>
> "Ceritanya, panggung calon tempat ketua Partai Randu roboh pagi-pagi, hanya beberapa jam sebelum dipakai. Panitia geger, tidak mungkin lagi membuat panggung. Pimpinan Partai Randu menuduh Partai Langit telah berbuat itu." (Kuntowijoyo, 2003)

Persaingan yang dilakukan kedua partai untuk mendapatkan pendukung kian ketat. Berbagai kecurangan untuk memuluskan tujuannya tersebut kian memuncak. Cara yang dilakukan itu baik secara halus maupun kasar sudah hal yang biasa. Bahkan sampai terjadinya teror dan pembunuhan. Hal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal ini sekali terjadi dalam penembakan misterius. Seperti kutipan berikut:

> "Kejahatan mereka sampai ketingkat ibis, terkutuk betul. LKMD-LKMD mengadakan rapat intern dan kemudia rapat gabungan. Mereka bikin resolusi agar pihak keamanan, yaitu TNI/POLRI bertanggung jawab. Resolusi itu dibawa para Kades dan Sekdes keatas dan diteruskan sampai atas betul. Kodim sebagai tentara hanya bisa menawarkan satu yang cespleng, yaitu menembak mereka ala petrus (Penembak misterius) yang terbukti sangat efektif ditempat lain. Memenjarakan dan memproses berdasar hukum akan mahal biayanya. Penjara tidak memuat mereka yang bejat moralnya dan bertele-tele." (Kuntowijoyo, 2003)

Berbagai Cara untuk Mendapatkan Suara

Kekuasaan yang dimiliki dalam suatu negara, membuat semua hal yang akan dilakukan begitu mudah. Dalam merencanakan pembakaran dan perusakan, lalu mengembalikannya seperti semula, dengan kata lain untuk mengambil rasa simpati masyarakat terhadap Partai Randu tersebut. Seperti kutipan berikut ini:

> "Saudara-saudara, saya baru saja terima surat ancaman. TPI akan dibakar kalau kita mencampuri urusan mereka. Karenanya, jangan diulangi lagi Wasripin. Mereka punya backing."
>
> "Api! Api! Tolong! Tolong!"
>
> "Dengan cepat orang-orang sekitar dengan ember berisi air. Tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Api membesar mengalahkan sinar bulan diatas. Api meludes bangunan dari kayu dengan cepat. Mereka tertegun melihat reruntuhan bangnan itu. Tempat mereka tawar-menawar tangkapan itu rata dengan tanah. Ketika siang itu kepala TPI datang, dia hanya mengumpat dalam hati. Untung ketua Partai Randu segera datang, menepuk-nepuk pundak, menentramkan hatinya."
>
> "jangan khawatir, ini pasti sebuah kesalahan. Akan kumintakan ganti, kata Ketua Partai Randu."
>
> "Siapa yang akan mengganti?"
>
> "Kau tahu beresnya saja, mereka pasti tidak tahu bahwa TPI itu persembahan Randu untuk nelayan."
>
> "Sungguh seperti sulapan, hanya dalam dua minggu TPI sudah berdiri lagi. Kerja lembur. Kali ini lebih bagus, tembok semen, kusen dan daun pintu kayu jati, dan cat-cat baru. Mereka mendengar bahwa Partai Randu yang membangun. Karenanya tidak heran dari mana datangnya duit untuk membangun, semua orang mengerti bahwa kekuasaan itu kuasa." (Kuntowijoyo, 2003)

Berbagai kecurangan banyak terjadi, apalagi didalam mendapatkan sebuah kekuasaan di pemerintahan. Segala cara dilakukan agar tujuan yang diinginkan terpenuhi. Dari janji-janji yang diberikan saat bekampanye, pemberian uang, hingga pencurian start dalam melakukan kampanye. Namun hal tersebut dapat menimbulkan konflik bagi badan pemerintahan itu sendiri. Seperti kutipan berikut:

> Seleksi ideologis, pengetahuan administratif, dan pengetahuan sosiokultural desa. Pengemuman calon diadakan dua minggu sebelum kampanye dan seminggu minggu tenang. Namun, beberapa calon telah mencuri start dan berkeyakinan akan lulus seleksi. Mereka membentuk kader, kampanye door-to-door, mengadakan rapat diam-diam, dan menjanjikan ini itu (termasuk memberi uang kepada pemilihnya). (Kuntowijoyo, 2003)

Di dalam pemilihan Kades, Wasripin memilih Pak Modin sebagai Kades, masyarakat di kampung itupun mengikuti Wasripin, karena Wasripin dipercayainya sebagai pemimpinn. Ketika Pak Modin meraih kemenangan, berbagai cara dilakukan oleh Danramil, agar tidak adanya pelantikan Kades yang dilakukan oleh Pak Modin. Seperti kutipan berikut:

> "Camat berpidato, "saudara-saudara. Kita sedang mencari tanggal yang pas. Pak Bupati sedang ke Jakarta, dipanggil presiden untuk mendapat petunjuk!" kata camat."
>
> "Dikira kata presiden akan membuat mereka tenang. Tetapi tidak, membuat mereka gaduh."
>
> "Ini akal-akalan apa!"
>
> "Kades yang memilih rakyat, yang melantik juga rakyat". (Kuntowijoyo, 2003)

Usaha partai Randu tidak berhenti, berbagai cara dilakukannya agar Partai Randu dapat diterima dihati rakyat. Meskipun cara-cara yang penuh dengan kekerasan. Seperti dalam kutipan berikut:

> "Pak Modin dedengkot Golput harus disingkirkan bila partai ini menang," kata Renstra yang dibuat ketua Partai Randu setempat ("disingkirkan artinya dimusnahkan", "dipenjara", atau "ditahan"). (Kuntowijoyo, 2003)

Pihak yang bertikai menggunakan berbagai cara kekerasan, baik anggota partai maupun anggota masyarakat nelayan. Partai Randu dan pemerintah memilih pemaksaan terhadap fisik dan mental masyarakat yang tidak ada rasa simpati terhadap partai tersebut. Partai Randu yang memiliki kekuasaan yang tinggi dipemerintahan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan suara, baik itu dengan cara yang halus dan kasar.

Selain itu, dalam mendapatkan dana untuk berkampanyepun elit partai mendapatkan dana dari berbagai perusahaan kontraktor reklamasi laut, jalan, jembatan, dan bangunan, dengan memberikan janji untuk memenangkan mereka tender dan berurusan dengan mudah. Seperti kutipan berikut:

> "Kalau pengurus tidak setuju, ketua mengatakan setidaknya pengurus memberi ijin padanya untuk mencari dana dari mana saja. Pengurus setuju. Ketua partai kemudian menghitung-hitung perusahaan mana yang dapat membantu partai. Ia mendekati beberapa perusahaan kontraktor reklamasi laut, jalan, jembatan,

> dan pembangunan untuk menyumbang dengan janji kemudahan dalam tender dan urusan dengan bank." (Kuntowijoyo, 2003)

Munculnya berbagai kelompok yang melakukan pembunuhan dan kekejaman, kelompok yang diduga ingin membebaskan dirinya. Target didalam pembunuhan tersebut adalah orang-orang penting dalam sebuah masyarakat. Orang yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kelangsungan dari partai. Pembungkaman pemerintah terhadap pers menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang melakukan semua itu adalah pemerintah. Seperti kutipan berikut:

> "Ada gerakan baru di desa sepanjang pantai. Mereka menyebut diri GPL, Gerakan Pemuda Liar." (Kuntowijoyo, 2003)

Korban Kekuasaan Politik

Dalam upaya mempertahankan kekuasaan dan mendapatkan kehormatan, serta mencapai tujuan politik yang diinginkan, dapat mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah untuk pencapaian tujuannya itu. Mengorbankan orang-orang baik, orang-orang yang telah berjasa, serta tidak mempedulikan lagi moral dan etika. Berbagai cara dilakukan dalam memuluskan keinginannya tersebut, termasuk nyawa jadi korban kekuasaan politik itu. Rekayasa politikpun dilakukan, Seperti dalam kutipan berikut:

> "PAGI TVRI dan koran-koran memberitakan bahwa Wasripin mati ditembak tentara waktu berusaha merebut senjata. Mayatnya dikuburkan disuatu tempat yang rahasia karena dapat menimbulkan syirik. Gambar-gambar setumpuk senapan dan seonggok granat tangan di bawah dipan dipajang. Kata para pejabat yang dikutip koran ialah bahwa Pemerintah akan menindak tegas pelaku-pelaku makar untuk membuat mereka miris. Perkampung nelayan itu mengirim orang untuk memborong koran-koran."
>
> "Mereka mendengar berita dari TVRI. Mereka yang membaca koran berteriak-teriak. Teriakan-teriakan terdengar."
>
> "Bohong!"
>
> "Tadi sore anak saya bersembunyi dikolong dipan Wasripin, senjata itu tidak ada." (Kuntowijoyo, 2003)

Selain Wasripin yang menjadi incaran kejahatan para penguasa itu, Pak Modin yang dikenal berjasa dan memiliki kebaikan-kebaikan di

perkampungan itu. Bahkan membuat Pak Modin hingga lupa ingatan. Seperti kutipan berikut:

> "Sebuah jip hijau berhenti. Tiga orang tentara turun. Mereka memapah seseorang berpiyama yang lusuh, lalu menaruh orang tua itu ditepi jalan. Sepotong bambu dilemparkan sepanjang dua meter. Orang tua yang ternyata bongkok itu berjalan mondar-mandir. Seorang lewat dengan sepeda motor. Orang itu berhenti."Pak Modin! Pak Modin!""
>
> "Orang tua itu diam saja, menatap kosong." (Kuntowijoyo, 2003)

KESIMPULAN

Kedua karya "*Orang-orang Proyek*" dan "*Wasripin dan Satinah*" merefleksikan gambaran penyimpangan politik pada masa Orde Baru. Munculnya novel "*Orang-orang Proyek*" tidak terlepas dari latar belakang pendidikan dan sosial budaya pengarang tersebut. Ahmad Tohari yang memiliki latar belakang sebagai Pesantren, yang lebih mendeskripsikan pikiran masyarakat kelas bawah, yang cenderung menerima keadaan.

Dalam karya Ahmad Tohari orang-orang cenderung diam dengan penindasan yang dilakukan kepada mereka. Pada novel "*Wasripin dan Satina*h", Kuntowijoyo yang lebih memiliki latar belakang akademis, yang tidak mau ditindas. Pendeskripsian pikiran lebih kepada tidak mau menerima ketertindasan. Masyarakat yang tertindas mau menyuarakan dan memberontak atas ketertindasan yang dilakukan terhadap mereka. Kedua novel ini memiliki kecenderungan isi yang memaparkan tentang kehidupan masyarakat kecil yang tertindas oleh elit politik.

Fakta-fakta yang dapat ditemukan pada penyimpangan politik yang mengorbankan rakyat kecil demi memuluskan tujuan dari elit politik tersebut. Dapat kita temukan korupsi dan bahkan kriminalisme yang dilakukan oleh petinggi-petinggi yang memiliki kekuasaan tertinggi itu. Kedua karya tersebut tidak dapat diterbit pada masa Orde Baru, karena terkesan menentang dan terlalu mengkritisi rezim tersebut. Beberapa penyimpangan politik yang ditemukan dalam dua novel tersebut, yaitu keserakahan elit politik, penyalahgunaan wewenang dalam pemanfaatan fasilitas proyek, kejujuran dan idealisme yang hilang dalam berpolitik, pertikaian antar partai, menghalalkan segala cara dalam meraih suara, dan politik yang tak segan memakan korban nyawa.

REFERENSI

Aminudin. (1990). *Pengantar Apresiasi Sastra*. Jakarta: CV. Sinar Baru.

Bungin, B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Emmerson, D. K. 2001. *Indonesia Beyond Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Harsutejo. (2010). *Kamus Kejahatan ORBA*. Depok: Komunitas Bambu.

Hudaya, F., Zed, M., & Hardi, E. (2019). Tinjauan Historiografi Tentang Kekerasan di Timor Timur (1976-1999) dalam Sastra Indonesia: Saksi Mata. *Galanggang Sejarah, 1*(1), 118–140. https://doi.org/10.5281/zenodo.2678095

Junus, U. (1981). *Mitos dan Komunikasi*. Jakarta: Sinar Harapan.

Kuntowijoyo. (2003). *Wasripin dan Satinah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Megawati, R. (2009). Hubungan antara Sastra dan Sejarah. Retrieved September 20, 617, from Ro5it4's Blog website: https://ro5it4.wordpress.com/2009/07/13/hubungan-antara-sastra-dan-sejarah/

Poesponegoro, M. D. & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sudirman, A. (2014). *Sejarah Lengkap Indonesia*. Yogyakarta: Diva Press.

Sugihastuti. (2002). *Teori Apresiasi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tohari, A. (2015). *Orang-orang Proyek*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wood, M. (2013).*Sejarah Resmi Indonesia Modern: Versi Orde Baru dan Para Penentangnya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Yanti, C. S. (2015). Religiositas Islam dalam Novel Ratu yang Bersujud Karya Amrizal Mochamad Mahdavi. *Jurnal Humanika 15*(3).

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.